

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olah hati, olah pikir, olah rasa dan olah raga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis

sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan tersebut diselenggarakan tidak hanya dalam pendidikan yang formal saja tetapi mencakup pendidikan Non Formal, salah satunya adalah pendidikan Diniyah Takmilyah. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 3 tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan, menyatakan bahwa pendidikan Diniyah adalah lembaga keagamaan Pendidikan Islam yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Upaya memenuhi Standar Nasional Pendidikan adalah dengan disusunnya standar isi, sebagai acuan pengembangan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Madrasah Diniyah akan tetapi Kementerian Agama pusat pada tahun 2009 belum memiliki standar isi tersebut sehingga Madrasah Diniyah belum memiliki acuan yang jelas mengenai Standar Isi yang harus diterapkan dalam

kegiatan belajar mengajar. Maka dari itu Kementerian Agama kantor Wilayah Jawa Barat berupaya untuk menyusun standar isi agar mampu menjawab kebutuhan Madrasah Diniyah sebagai upaya tercapainya standar Nasional pendidikan. Karena itu pada tahun 2009 sampai 2010 Kementerian Agama menyusun standatr isi kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah Provinsi Jawa Barat. Kurikulum ini ditetapkan ke dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.5/1/PP.00.8/4114 /2010 Tanggal 22 September 2010.

Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Provinsi Jawa Barat ini mencerminkan sebuah upaya yang nyata terhadap pengembangan standar minimal kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah secara nasional sebagaimana dimaksudkan oleh Surat Direktur PD Pontren Nomor : Dt.I.III/PP.00/428/2010 tanggal 21 Juni 2010 Perihal : Revisi Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2014, diperoleh kenyataan bahwa Kementerian Agama menyusun Standar isi kurikulum Diniyah Takmiliyah bertujuan untuk mengembangkan standar Nasional Pendidikan. Fenomena tersebut membawa penulis untuk mengkaji proses penyusunan Standar Isi Kurikulum yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Barat. Hasil studi pendahuluan diperoleh kenyataan menarik bahwa Kurikulum Diniyah pertama disusun oleh Kementerian Agama daerah provinsi Jawa Barat bukan Kementerian Agama Pusat.

Fenomena tersebut menarik untuk diteliti lebih jauh, dan memunculkan beberapa masalah mendasar diantaranya: Apa yang menjadi latar belakang disusunnya Standar Isi kurikulum Diniyah Takmiliyah? Bagaimana strategi penyusunan dan pengembangan Standar isi Kurikulum Diniyah Takmiliyah Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Barat ? Apa landasan teori yang menjadi *afiliasi* ilmu atau pendekatan teorinya? Pendekatan apa yang mendasarinya? Bagaimana “syntax” langkah-langkah penyusunan Standar isi kurikulum Diniyah Takmiliyah?; bagaimana Implementasi Standar isi kurikulum Diniyah Takmiliyah provinsi Jawa Barat? Bagaimana Program Evaluasinya? Faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung penyusunannya?

Atas dasar fenomena di atas serta atas dasar pentingnya masalah tersebut untuk diteliti dan dikembangkan, maka masalahnya akan diteliti dalam bentuk penelitian etnografi kualitatif deskriptif, dengan judul : " **MANAJEMEN PENYUSUNAN KURIKULUM DINIYAH TAKMILIAH AWALIYAH (Penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat)**

## **B. Perumusan Masalah**

Fokus penelitian ini adalah Manajemen Penyusunan Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Provinsi Jawa Barat :

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Kementerian Agama kantor Wilayah Jawa Barat?
2. Bagaimana konsep Kurikulum yang dikembangkan dalam Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang disusun oleh Kementerian Agama kantor Wilayah Jawa Barat?

3. Bagaimana manajemen penyusunan Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat?
4. Apa faktor pendukung dan penghambat penyusunan kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat?
5. Bagaimana hasil penyusunan Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya Madrasah Diniyah Kementerian Agama kantor Wilayah Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui konsep Kurikulum yang dikembangkan dalam Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang disusun oleh Kementerian Agama kantor Wilayah Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui manajemen penyusunan Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penyusunan kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat?
5. Untuk mengetahui hasil penyusunan Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat.

Sedangkan kegunaan penelitian yang diharapkan dengan penelitian adalah:

1. Dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pendidikan Islam.
2. Diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan model pendidikan pesantren khususnya dalam pengembangan Kurikulum.

3. Secara spesifik diharapkan berguna sebagai inspirasi untuk penyusunan Standar isi.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Manajemen dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah management. Kata tersebut berasal dari kata kerja *“to manage yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola”*. Menurut Mary Parker Follet, *‘Management is the art of getting things done through people’* (Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain) (Ernie: 2009, 5). Menurut Koontz, *‘Management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals, working together in groups, effeciently accomplish selected aims’* (Manajemen adalah proses merancang dan memelihara suatu lingkungan dimana individu-individu bekerja sama dalam kelompok secara efisien dalam menyelesaikan tujuan yang dipilih) (Ernie: 2009, 5). Adapun menurut Gareth R. Jones dan Jennifer M. George, *“Management, then, is the planning, organizing, leading, and controlling of human and other resources to achieve organizational goals effectively and efficiently”* (manajemen, lalu, (dia itu) adalah perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan manusia dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Gareth: 2006, 5)

Menurut J.P. Campbell, *‘efficiency is a measure of how well or how productive resources are used to achieve a goal’* (efisiensi adalah ukuran dari seberapa baik atau bagaimana sumber daya produktif yang digunakan untuk mencapai tujuan. Ada juga yang menyebutkan “efisien adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar (*doing the things right*)”).

Defenisi-definisi manajemen di atas menunjukkan bahwa manajemen itu memiliki beberapa cakupan. Pertama, manajemen sebagai suatu proses atau aktivitas. Proses tersebut terdiri dari *planning*, *organizing*, *directing*, dan *controlling*. Kedua, manajemen sebagai suatu seni (*art*). Hal ini akan sangat tergantung kepada orang yang memainkannya. Ketiga, manajemen terdiri dari individu-individu yang saling berinteraksi dalam suatu aktivitas. Keempat, manajemen menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia dengan efektif dan efisien. Sumber daya yang dimaksud adalah 6 M+I+T, yaitu *Man*, *Money*, *Materials*, *Machines*, *Methods*, *Market*, *Information*, dan *Technologie*. Kelima, manajemen merupakan upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *إِدَارَةٌ* dan *تَدْبِيرٌ*. Menurut Ahmad Mukhtâr ‘Umar, Kata *تَدْبِيرٌ* merupakan kata benda bentuk tunggal (mufrod) yang bentuk jamaknya adalah *تَدَابِيرٌ*. Kata tersebut memiliki beberapa makna sebagai berikut:

1. Mashdar (nominal) dari kata *دَبَّرَ*.
2. Berhati-hati dan persiapan (*إِحْتِيَاظٌ وَاسْتِعْدَادٌ*). Kalimat *إِتَّخَذَ التَّدَابِيرَ اللَّازِمَةَ*

bermakna

mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Kalimat *تَدَابِيرٌ أَمْنٍ مُّشَدَّدَةٌ*

bermakna langkah-langkah keamanan yang ketat (kuat).

3. Tindakan dan laporan/keterangan (تَصْرُفٌ وَتَقْرِيرٌ). Kalimat الْمُرءُ فِي التَّفْكِيرِ وَاللَّهُ

بِ التَّدْبِيرِ bermakna seseorang merencanakan, tapi Allah yang menentukan.

Sesungguhnya kata al-idâroh tidak datang dalam satu ayat pun pada ayat-ayat Al-Quran Al-Karîm. Sungguh telah datang dalam Al-Quran kata tudîrûnahâ pada ayat:

..... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا..... ﴿البقرة: 282﴾

Artinya: “..... Kecuali apabila mu’âmalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan.....” ﴿QS Al-Baqoroh: 282﴾

Sebagaimana datang juga kata tadûru dalam ayat yang mulia ini:

..... يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ..... ﴿الأحزاب: ١٩﴾

Artinya: “..... Mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik.....” ﴿Al-Ahzâb: 19﴾

*Al-Mu’jam Al-Mufahros li Alfâdh Al-Qurân Al-‘Adhîm* menyebutkan sejumlah ayat, dimana ayat-ayat itu merupakan derivasi (kata jadian) dari fi’il tsulatsi دَارَ pada materi دَوَّرَ. Sementara berdasarkan pemeriksaan dalam *Al-Mu’jam*

*Al-Mufahros li Alfâdh Al-Hadîts An-Nabawiy*, jelas bahwa kata *al-idâroh* tidak datang dalam satu hadîts pun dari hadîts-hadîts Rasulullah. Kebanyakan kamus

bahasa menyebutkan kata دَوْرٌ dan derivasinya. Akan tetapi, tidak menyebutkan kata إِدَارَةٌ. Ar-Rôzî (w. 666 H) dalam Mukhtâr Ash-Shihâh (1999:195).

Adapun fungsi manajemen menurut George Tery (Sukmadi, 2012: 45) adalah sebagai berikut:

### 1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan (*planning*) merupakan tahap awal dalam proses manajemen. Ada beberapa mengenai perencanaan. “Perencanaan atau *planning* yaitu proses menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi”. Dalam definisi lain dikatakan, “*planning* adalah proses membandingkan, menilai, memilih alternatif yang baik dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka tujuan bersama”. “*Planning* adalah proses estimasi kemungkinan yang akan datang, menilai kemampuan yang dimiliki untuk mencapai kemungkinan itu”. Berdasarkan ketiga definisi tersebut, maka dapat dirangkai bahwa perencanaan (*planning*) itu adalah persiapan yang dilakukan dengan melihat kemampuan yang dimiliki untuk menghadapi masa depan dengan menggunakan strategi serta taktik guna tercapainya tujuan bersama.

Perencanaan akan membuahkan hasil. “Hasil dari perencanaan adalah tentu saja rencana/rencana kerja”. “Rencana kerja yang kita buat itu haruslah merupakan alternatif yang paling baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Dengan demikian, sebelum merumuskan perencanaan, maka kita harus merumuskan tujuan terlebih dahulu. Tanpa adanya tujuan, maka kita akan sulit merumuskan

perencanaan yang selanjutnya akan menghasilkan rencana kerja. Perencanaan ini merupakan tindak lanjut (*follow up*) dari tujuan bersama yang telah dirumuskan.

## 2. Pengorganisasian (*Organizing*)

“Pengorganisasian berasal dari kata organisasi yang berarti tempat/wadah/alat dari sekumpulan orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Ahmad Fadli menjelaskan Pengorganisasian adalah seluruh proses pegelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu organisasi yang bisa digerakan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pengorganisasian merupakan langkah awal ke arah pelaksanaan rencana yang telah tersusun sebelumnya.

Pengorganisasian tidak bisa lepas dari prosesnya itu sendiri. “Proses pengorganisasian adalah proses pengaturan anggota organisasi dan sumber daya lainnya untuk bekerjasama mencapai tujuan organisasi”. Adapun proses pengorganisasian itu adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi aktivitas-aktivitas atau pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Departementalisasi, yaitu untuk pengelompokan aktivitas atau pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
- c. Pendelegasian wewenang (*delegation of authority*), pendelegasian wewenang untuk menjalankan aktivitas atau pekerjaan tertentu.
- d. Koordinasi (*coordination*), adalah proses penentuan hubungan, wewenang, dan informasi secara horizontal maupun vertikal.

Organisasi dan pengorganisasian ini menghasilkan hubungan. “Hubungan antara organisasi dan pengorganisasian adalah organisasi merupakan hasil dari proses pengorganisasian”.

### 3. Pelaksanaan (*Actuating*)

pelaksanaan merupakan upaya untuk menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Menurut Gareth R. Jones dan Jennifer M. George (2006: 5) “*effectiveness is a measure of the appropriateness of the goals that managers have selected for the organization to pursue, and degree to which the organization achieve those goals*” (efektivitas adalah ukuran kesesuaian (kelayakan) tujuan-tujuan yang telah dipilih para manajer bagi organisasinya untuk mengejar, dan sejauh mana organisasi itu mencapai tujuan-tujuan tersebut). Ada yang menjelaskan “efektif adalah kemampuan untuk menetapkan tujuan yang tepat atau kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*)”.

### 4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan (*controlling*) disebut juga dengan istilah pengendalian. Mockler Scermerhorn menjelaskan, ‘pengawasan sebagai proses di dalam menetapkan ukuran kerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut’. Dengan demikian, pengawasan berarti upaya untuk membandingkan antara rencana kerja yang telah diorganisasikan dengan aktualisasinya (pelaksanaannya).

Pengawasan memiliki proses tersendiri. Proses pengawasan ini dilakukan untuk membandingkan rencana kerja yang telah diorganisasikan dengan aktualisasinya (pelaksanaannya). Adapun proses pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menentukan standar

Pada prinsipnya standar adalah kriteria hasil kerja yang dipilih dalam keseluruhan program perencanaan dimana pengukuran hasil kerja dilakukan sehingga manajer dapat menerima sinyal tentang hal-hal tertentu yang terjadi, dan tidak selalu harus memperhatikan setiap langkah-langkah dalam menjalankan perencanaan tersebut.

Makin kecil kadar teknis suatu pekerjaan, makin sulit untuk menentukan standar. Misalnya standar untuk menentukan jumlah produksi karyawan perhari lebih mudah ditentukan daripada standar untuk pekerjaan manajer keuangan. Standar yang baik adalah standar yang dapat diukur (*verifiable objectives*).

b. Pengukuran hasil kerja

Jika standar yang ditentukan telah sesuai, maka pengukuran atau penilaian hasil kerja akan mudah dilakukan.

c. Tindakan koreksi terhadap perbedaan antara standar dengan aktualnya.

Jika hasil kerja diukur secara tepat, maka akan lebih mudah melakukan tindakan koreksi jika ada perbedaan antara standard an aktualnya (Erinie: 2009, 317)

Dasar kurikulum berlandaskan falsafah negara yaitu pancasila republik indonesia UUD 1945 yang mengedepankan pandangan hidup suatu bangsa. Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman penyelenggara pembelajaran pada semua jenis jenjang pendidikan. Secara terminologi kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dikatakan juga Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan melalui isi dan bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

Dalam Undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal 19 tentang sistem pendidikan nasional. Yang berbunyi: kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Di negara indonesia telah banyak memakai berbagai kurikulum akan tetapi indonesia menitik beratkan pada model yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented curriculum*) dan model kurikulum yang berbasis kompetensi yang berorientasi pada tujuan.

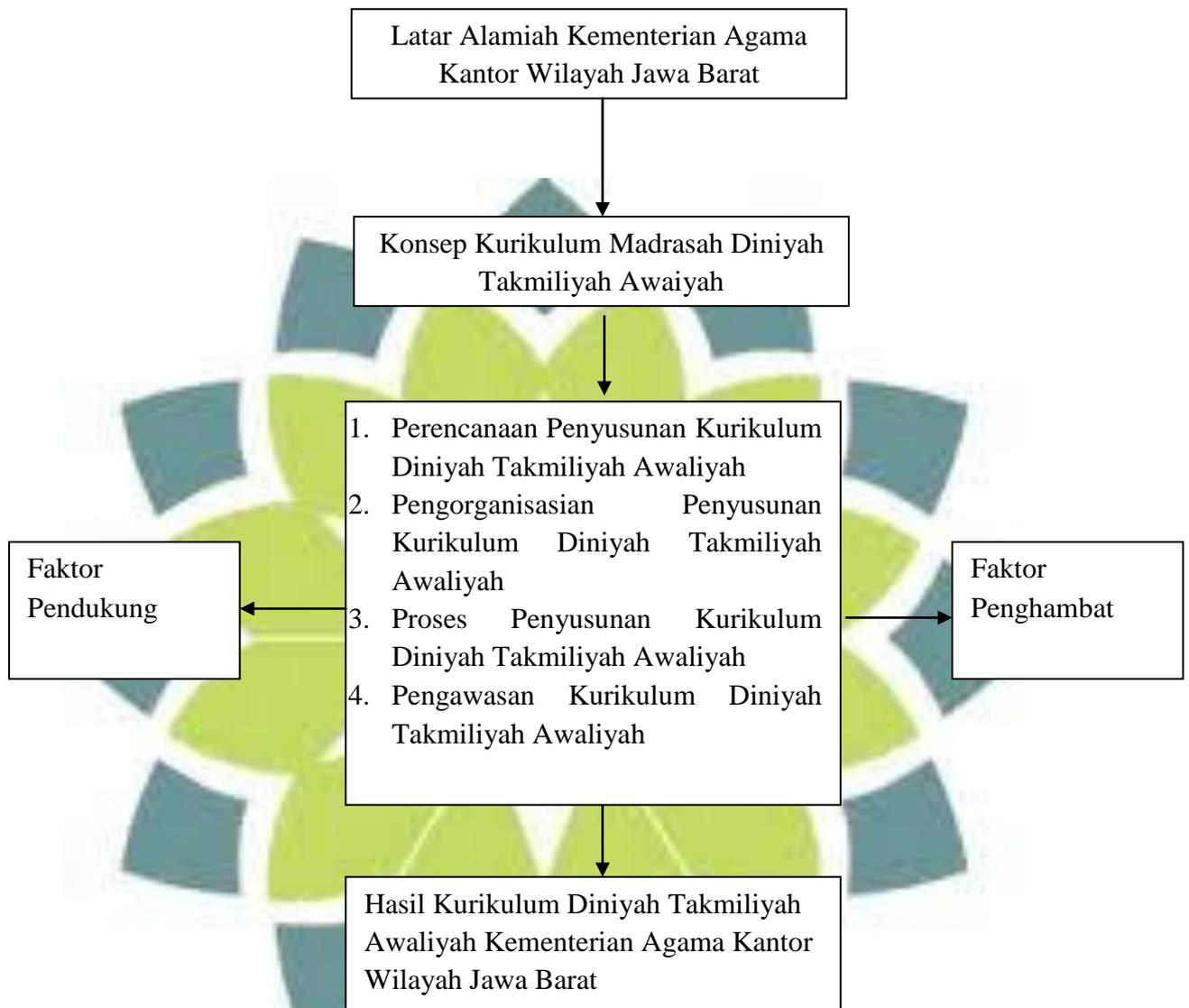
Prinsip adalah dasar atau asas kebenaran yang jadi pokok dasar berpikir, bertindak. Adapun yang disebut dengan “Pengembangan” “Perkembangan” dari kata “Berkembang” yaitu memiliki arti memekar, terbuka atau mebentang, menjadi luas atau bertambah banyak bahkan menjadi sempurna dalam hal pemikiran atau pengetahuan. Yang meliputi aspek-aspek yang bersufat Abstrak dan konkrit.

Beberapa pengembangan kurikulum unggul dalam membuat konsep langkah-langkah (perencanaan), menggunakan perencanaan kurikulum (penerapan), menilai hasil kurikulum (Evaluasi).

Prinsip memberikan arahan untuk mngsrahkan kegiatan-kegiatan orang yang bekerja didalam bidang tertentu, prinsip-prinsip kurikulum diambil dari sumber-sumber:

1. Data empiris
2. Data experimental
3. Cerita kurikulum, disusun atas kepercayaan dan sikap-sikap yang belum terbukti kebenarannya.
4. Anggapan umum, dalam pengetahuan dan teknologi sikap-sikap yang diberlakukan yaitu bahwa prinsip-prinsip harus diambil secara ilmiah dari haasil penelitian.

Anggapan umum yang sering tidak dipercaya, kombinasi cerita-cerita dan generalisasi berdasarkan observasi, dan pembelajaran ditemukan melalui experiment dengan intuisi dan pemikiran yang masuk akal. Anggapan ini tidak hanya berfungsi sebagai konsep kurikulum tetapi juga sebagai metodologi untuk memperkecil pertemuan konstruksi dan prinsip teoritis metodenya didasarkan atas penyelesaian praktis masalah-masalah spesifik.

**Bagan 1.1.****Bagan Kajian Teori****E. Langkah-Langkah Penelitian**

Dalam langkah penelitian ini dijelaskan tahapan langkah yang dilakukan dalam proses penelitian ini yang meliputi: (1) jenis data, (2) sumber data, (3) metoda dan teknik pengumpulan data, (4) langkah analisis data, dan (5) teknik

pemeriksaan uji absah data. Secara rinci kelima tahapan tersebut diurai sebagai berikut:

1. Menentukan Jenis Data

Jenis data pokok yang yang dikumpulkan adalah jenis data Kualitatif, yakni data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati yang berkaitan dengan latar alamiah, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi Standar Isi Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyyah 2013 Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat yang bertempat di Jl. Jend Sudirman Secara relative ada pula data kuantitatif terkait data subyek penelitian dan sarana sebagai data pelengkap.

2. Menentukan Sumber Data

- a. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian lapangan, dalam penelitian ini penulis menentukan tempat penelitian di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat yang bertempat di Jl. Jend. Sudirman dengan alasan sebagai berikut : Pertama, Lembaga tersebut merupakan adalah salah satu instansi vertikal kementerian Agama RI yang melaksanakan tugas dan fungsi kementerian Agama di tingkat provinsi dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama. Sehingga banyak data yang akan diperoleh. Selain itu instansi kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Barat adalah lembaga yang mengakomodir seluruh kegiatan pendidikan Agama dan Keagamaan seluruh Jawa Barat sehingga dapat mengetahui Standar Isi Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyyah 2013 Kementerian Agama Kantor Wilayah

Provinsi Jawa Barat, dari awal disusun sampai sekarang yang dikembangkan. Kedua, adanya masalah yang akan diteliti terkait dengan manajemen Standar isi Kurikulum Diniyah Takmiliyah provinsi Jawa Barat yang dianggap unik dan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pendidikan islam, serta pihak pengurus mengizinkan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

b. Key Informan

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif dalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang yang dapat diamati atau diwawancarai yang dicatat melalui catatan tertulis atau rekaman dalam penelitian ini merupakan sumber data utama, dengan menggunakan teknik sampling, yaitu dengan cara mewawancarai kepada pihak Kepala Bidang PD Pontren dan Kepala Seksi Diniyah Takmiliyah sebagai *Key Informan*, kemudian diikuti dengan *Snow Ball Process*, yaitu sumber data berikutnya diperoleh dari *key informan* tersebut secara bergulir, dan baru dihentikan apabila terjadi pengulangan informasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan data tambahan berupa dokumen, arsip, buku-buku referensi, dan sumber data lainnya yang dapat menunjang terhadap sumber data penelitian mengenai Standar Isi Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyyah 2013 Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat.

3. Menentukan Metode dan Teknik Pengumpulan Data

a. Menentukan metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yakni metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang sedang terjadi atau berlangsung secara rinci apa adanya.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data yaitu:

1) Teknik Observasi Parsitipasi

Observasi yang dilakukan yaitu observasi partisipasi aktif yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan data-data tentang model manajemen Standar Isi Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyyah 2013 Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat. Peneliti melakukan pengamatan dan terlibat ikut serta sebagai peserta pengamat selama beberapa bulan di lokasi.

2) Teknik Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan Key Informan, dalam hal ini Kepala Bidang PD Pontren dan Kepala Seksi Diniyah Takmiliyah. Wawancara menggunakan model wawancara terbuka; untuk mengumpulkan data tentang masalah pokok yang diteliti, khususnya untuk verifikasi data dan mengenai hal-hal terkait alasan digunakan suatu model manajemen Standar Isi Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyyah 2013 Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat.

c) Teknik Dokumentasi atau Teknik Menyalin

Teknik ini digunakan untuk mengetahui data tertulis mengenai Standar Isi Kurikulum Diniyah Takmiliah Awaliyyah 2013 Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dan setting penelitian lainnya seperti data personalia. Melalui proses penelusuran dokumen, buku-buku referensi, data yang ada dijadikan bahan data pokok dan data tambahan untuk melengkapi.

#### 4. Analisis Data

Analisis Data yang dilakukan yaitu analisis kualitatif. Adapun tahapan langkah analisis yang dilakukan yaitu:

- 1) Unitisasi: yaitu pemrosesan satuan. Dalam unitisasi ini, terdapat langkah-langkah yang dilakukan Yaitu :
  - a) Mereduksi data, maksudnya yaitu memilih data dari berbagai sumber yang relevan dengan data yang di inginkan.
  - b) Memberi Kode, Maksudnya memberi Kartu Indeks yang berisi satuan-satuan, kode-kode dapat berupa penandaan sumber asal satuan seperti catatan lapangan, penandaan lokasi, dan penandaan cara pengumpulan data.
- 2) Kategorisasi data

Yaitu proses pengelompokan data yang telah terkumpul dalam kategorisasi ini. Ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu diantaranya:

- a) Mereduksi data, maksudnya memilih data yang sudah dimasukan kedalam satuan dengan cara membaca satuan yang sama. Jika tidak sama maka akan disusun kembali untuk membuat kategori baru.

- b) Membuat koding, maksudnya memberikan nama atau judul terhadap satuan yang mewakili entri pertama dari kategori.
- c) Menelaah Kembali seluruh Kategori
- d) Melengkapi data-data yang telah terkumpul untuk ditelaah dan dianalisis.

### 3) Penafsiran Deskriptif Semata

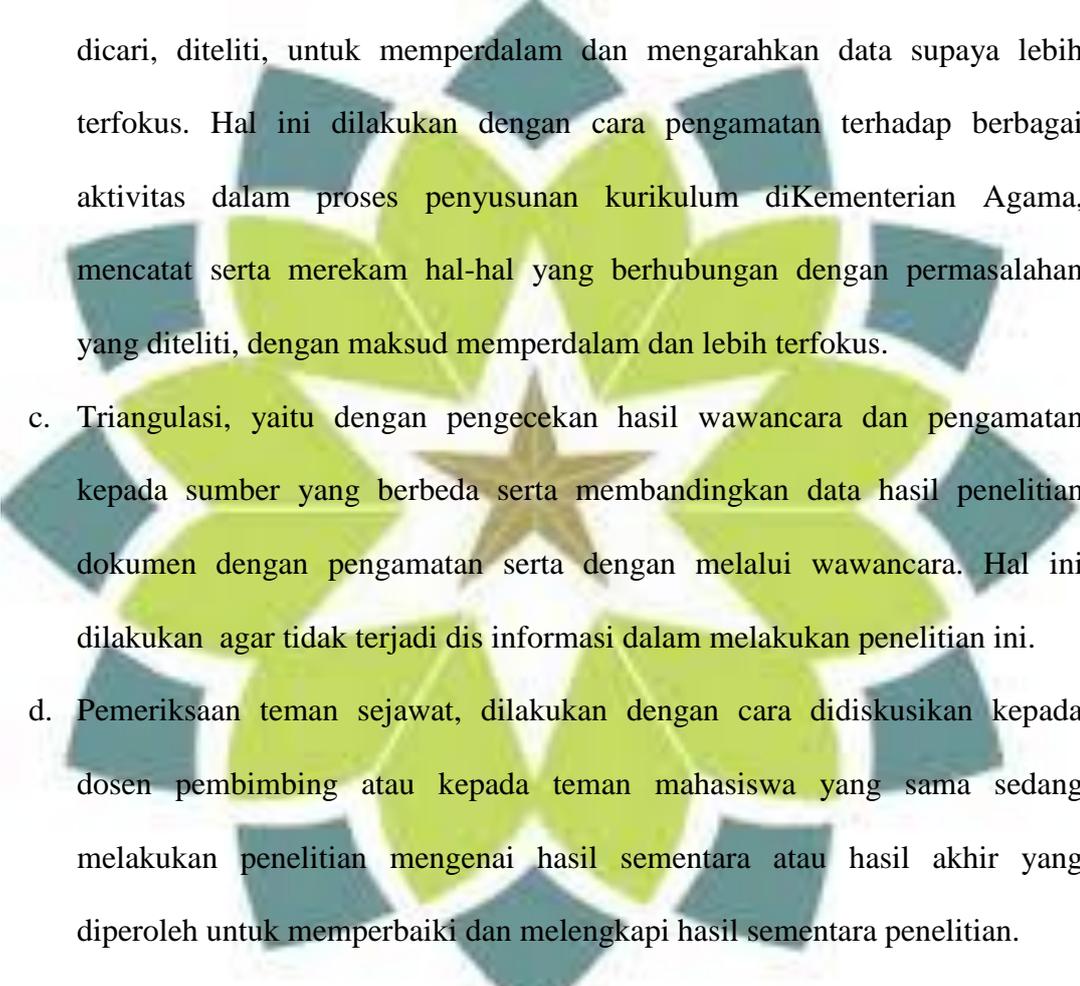
Penafsiran dilakukan dengan cara memberi penafsiran-penafsiran logis dan empiris berdasarkan data yang terkumpul selama penelitian. Tujuan yang akan dicapai dalam penafsiran data ialah deskripsi semata-mata dengan menggunakan teori “Wujud kebudayaan” dan teori mengenai “model kurikulum” sebagai alat sistematisasi analisis. Dengan Tujuan penafsiran deskripsi semata-mata ini dimaksudkan data hanya dideskripsikan dengan sistematisasi wujud kebudayaan dan komponen model Kurikulum.

### 5. Uji Keabsahan Data

Agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka data yang terdapat pada hasil penelitian ini perlu diuji keabsahannya. Untuk itu maka perlu dilakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang telah terkumpul dengan kriteria kepastian logika, dapat dipertanggung jawabkan, dengan proses kerteralihan dan ketergantungan secara relevan sesuai dengan keakuratan data yang diperoleh, serta menggunakan teknik pemeriksaan kembali terhadap keabsahan data tersebut. Adapun langkah pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut sebagai berikut :

- a. Perpanjangan keikutsertaan, hal ini dilakukan untuk mendeteksi serta menghitung distorsi yang mungkin dapat mengotori data. Perpanjangan

keikutsertaan yang dilakukan dengan tinggal di lokasi penelitian dan terlibat dalam berbagai kegiatan dengan waktu kurang lebih tiga bulan, yaitu sejak bulan Februari 2014 sampai dengan April 2014.

- 
- b. Ketekunan pengamatan, maksudnya untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, diteliti, untuk memperdalam dan mengarahkan data supaya lebih terfokus. Hal ini dilakukan dengan cara pengamatan terhadap berbagai aktivitas dalam proses penyusunan kurikulum diKementerian Agama, mencatat serta merekam hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dengan maksud memperdalam dan lebih terfokus.
  - c. Triangulasi, yaitu dengan pengecekan hasil wawancara dan pengamatan kepada sumber yang berbeda serta membandingkan data hasil penelitian dokumen dengan pengamatan serta dengan melalui wawancara. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi dis informasi dalam melakukan penelitian ini.
  - d. Pemeriksaan teman sejawat, dilakukan dengan cara didiskusikan kepada dosen pembimbing atau kepada teman mahasiswa yang sama sedang melakukan penelitian mengenai hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh untuk memperbaiki dan melengkapi hasil sementara penelitian.
  - e. Analisis kasus negative: dilakukan dengan cara mengumpulkan contoh-contoh serta kasus-kasus yang tidak sesuai dengan dengan pola dan kecenderungan informasi yang terkumpul untuk digunakan sebagai bahan pembanding.

- f. Kecukupan referensi, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyak terkait dengan setting dan fokus penelitian. Melengkapinya dengan cara menanyakan langsung kepada pihak pimpinan Pesantren, serta mencari informasi dari sumber lain, termasuk referensi dari sumber tertulis.
- g. Pengecekan anggota, dilakukan dengan cara memeriksa dan melaporkan data hasil penelitian kepada sumbernya (pihak pimpinan pesantren), guna menyamakan persepsi antara peneliti dengan pihak sumber yang diteliti.
- h. Uraian rinci, dilakukan dengan cara melaporkan hasil penelitian secara rinci dan lebih cermat, dimaksudkan agar proses keteralihan informasi seperti yang terdapat di lokasi.
- i. Auditing untuk kriteria kebergantungan, proses auditing dilakukan dengan cara berkonsultasi dengan auditor (pembimbing) untuk menentukan apakah penelitian ini perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan sesuai dengan lengkap tidaknya data yang terkumpul.
- Auditing untuk kriteria kepastian, proses auditing dilakukan dengan cara memeriksakan data atau mengadakan klarifikasi data yang terkumpul kepada subjek penelitian, dalam hal ini kepada Kepala Bidang PD Pontren Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat
- j. Kepala Bidang PD Pontren Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat yang bertempat di Jl. Jend. Sudirman. Bukti keabsahan data hasil dari pemeriksaan data tersebut dibuktikan dengan surat persetujuan atau pernyataan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan sebenarnya dari Kepala Bidang Pondok Pesantren.

## F. Kajian Pustaka dan Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk lebih memperdalam kajian mengenai pesantren ini telah dikaji beberapa pustaka yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Dalam buku Manajemen Kurikulum, Seri Manajemen Seri Bermutu, yang dikarang oleh Rusman, terbitan Bandung yang diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada pada tahun 2010 buku ini berisi tentang model-model pembelajaran dari berbagai sudut pandang seperti strategi, pendekatan dan metodologinya. Secara rinci Buku ini membahas berbagai manajemen kurikulum diterapkan dalam sebuah lembaga pendidikan.
2. Dalam buku Manajemen Pendidikan; Aplikasi Dan Penyusunan Rencana Penbembangan sekolah atau Madrasah, yang dikarang oleh Muhaimin, Sutiah, dan Sugeng Listyo Prabowo, diterbitkan di Jakarta oleh Prenada Media Group tahun 2010, dalam buku ini berisi mengenai konsep Manajemen Pendidikan Islam serta metodologi analisis Manajemen serta secara garis besar menerangkan mengenai Manajemen Pendidikan Islam serta sekolah.
3. Dalam skripsi manajemen Pengembangan Kurikulum pada Madrasah Ibtidaiyyah Persis 23, yang dikarang oleh Jaka Pramana Shidiq, penelitian ini dilaksanakan desa tanjung sari kecamatan cangkuang Kabupaten Bandung pada tahun 2012. Dalam Skripsi ini dibahas mengenai Hakikat Manajemen disertai dengan komponrn Pengembangan Kurikulum.